



PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT JENDERAL
TA. 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 INSPEKTUR JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Razilu
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

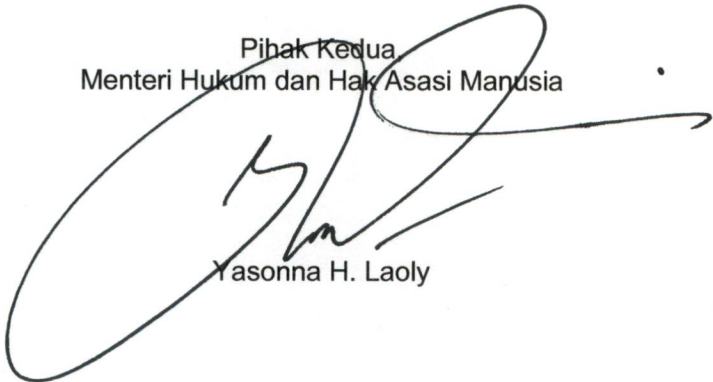
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 JANUARI 2023

Pihak Kedua
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia


Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,
Inspektur Jenderal


Razilu
NIP. 196511281991031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR JENDERAL DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Maturitas SPIP	3 (terdefinisi)
		2. Opini Atas Laporan Keuangan	WTP
		3. Indeks Persepsi Integritas	80,2

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	1. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM	WTP
2.	Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	Level 3 - Terdefinisi
3.	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	1. Persentasi Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB"	94 %
		2. Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 90	94 %
		3. Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM	8 %
		4. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	80,2 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan	1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenumham	3 (integrated)
		2. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	78 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)		
	Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Zona Pembangunan Integritas WBK/WBBM	3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	70 %		
		4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	90 %		
		5. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	85 %		
		6. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	82 %		
		7. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL I yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	8,0 %		
		8. Level Maturitas SPIP Kemenkumham	4,439		
		2.	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Zona Pembangunan Integritas WBK/WBBM	1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 (integrated)
				2. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	60 %
		3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	85 %		
		4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	87 %		
		5. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian	72 %		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	
		6. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	77 %
		7. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL II yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	5,0 %
		8. Level Maturitas SPIP Kemenkumham	4,439
3.	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 (integrated)
		2. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	60 %
		3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	75 %
		4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	90 %
		5. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	74 %
		6. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	82 %
		7. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL III yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	6,0 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		8. Level Maturitas SPIP Kemenkumham	4,439
4.	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 (integrated)
		2. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	58 %
		3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	10 %
		4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	90 %
		5. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	77 %
		6. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	82 %
		7. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL IV yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	8,0 %
		8. Level Maturitas SPIP Kemenkumham	4,439
5.	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam	1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 (integrated)
		2. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	45 %
		3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait	33 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	
		4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	95 %
		5. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	66 %
		6. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	86 %
		7. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL V yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	20 %
		8. Level Maturitas SPIP Kemenkumham	4,439
6.	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 (integrated)
		2. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	27 %
		3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	84 %
		4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	88 %
		5. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian	94 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	
		6. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	82 %
		7. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL VI yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	8,0 %
		8. Level Maturitas SPIP Kemenkumham	4,439
7.	Terimplementasinya Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar untuk Meningkatkan Integritas Kemenkumham	1. Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM untuk Meningkatkan Integritas Kemenkumham	1 Rekomendasi
		2. Indeks Persepsi Integritas	80,2 (Indeks)
8.	Mengoptimalkan Efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	1. Indeks RB ITJEN	34,93 (Indeks)
		2. Nilai SAKIP ITJEN "Baik"	82,90
9.	Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal yang Berkualitas, Berintegritas dan Profesional	1. Presentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi	88 %
		2. Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham	4 Nilai/Indeks
10.	Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Andal dan Responsif	1. Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/Pengendalian Internal	85 %
11.	Terwujudnya Layanan Kantor yang Akuntabel	1. Persentase Realisasi Layanan Perkantoran yang Akuntabel	88 %
		2. Jumlah Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan, BMN, dan Sarpras Internal	12 bulan Layanan
18.	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel	1. Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel	WTP
		2. Persentase Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Inspektorat Jenderal	90 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. Persentase Rekomendasi atas Penyusunan RKA-KL ITJEN yang Ditindaklanjuti	97 %

No.	Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen		Rp. 69.026.935.000,-
1.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	Rp. 4.429.775.000,-
2.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	Rp. 4.429.775.000,-
3.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	Rp. 4.429.775.000,-
4.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	Rp. 4.429.775.000,-
5.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	Rp. 4.429.775.000,-
6.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	Rp. 6.100.526.000,-
7.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 40.777.534.000,-

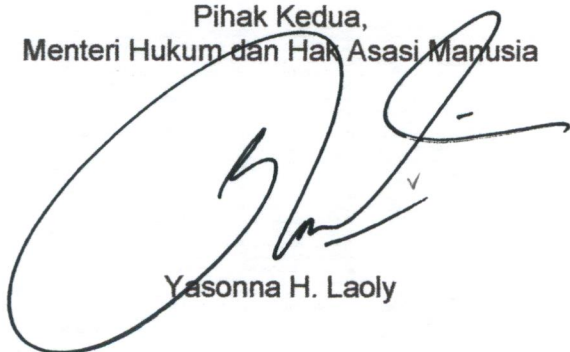
Sumber data : DIPA ITJEN Th.2023 Nomor DIPA-013.02-0/2023 Tanggal 30 November 2022

Digital Stamp Nomor DS:0419-4047-1686-6320.

- Berdasarkan Nota Dinas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-PR.01.04-38 tanggal 15 Desember 2022 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2023, dilakukan blokir *Automatic Adjustment* atas saldo anggaran Inspektorat Jenderal sebesar Rp. 650.264.000,-

Jakarta, 2 JANUARI 2023

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,
Inspektur Jenderal



Razilu
NIP. 196511281991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR JENDERAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Razilu
Jabatan : Inspektur Jenderal

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 JANUARI 2023

Inspektur Jenderal

Razilu
NIP. 196511281991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yayah Mariani
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Razilu
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 JANUARI 2023

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Yayah Mariani
NIP 196403111994032007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL DENGAN INSPEKTUR JENDERAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Maturitas SPIP	3 (terdefinisi)
		2. Opini Atas Laporan Keuangan	WTP
		3. Indeks Persepsi Integritas	80,2 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	1. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM	WTP
2.	Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	Level 3 - Terdefinisi
3.	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	3. Persentasi Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB"	94%
		4. Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 90	94%
		5. Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM	8%
		6. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	80,2 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terimplementasinya Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar untuk Meningkatkan Integritas Kemenkumham	1. Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM untuk Meningkatkan Integritas Kemenkumham	1 Rekomendasi
		2. Indeks Persepsi Integritas	80,2 (Indeks)
2.	Mengoptimalkan Efektivitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	1. Indeks RB ITJEN	34,93 (Indeks)
		2. Nilai SAKIP ITJEN "Baik"	82,90
3.	Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal yang Berkualitas, Berintegritas dan Profesional	1. Presentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi	88%
		2. Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham	4 Nilai/Indeks
4.	Mengembangkan Kualitas Sistem Informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Andal dan Responsif	1. Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/Pengendalian Internal	85%
5.	Terwujudnya Layanan Kantor yang Akuntabel	1. Persentase Realisasi Layanan Perkantoran yang Akuntabel	88%
		2. Jumlah Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan, BMN, dan Sarpras Internal	12 bulan Layanan
6.	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Jenderal yang Optimal dan Akuntabel	1. Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel	WTP
		2. Persentase Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Inspektorat Jenderal	90%
		3. Persentase Rekomendasi atas Penyusunan RKA-KL ITJEN yang Ditindaklanjuti	97%

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Dukungan Manajemen	Rp. 40.775.534.000,-
1.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 40.777.534.000,-

Sumber data : DIPA ITJEN Th.2023 Nomor DIPA-013.02-0/2023 Tanggal 30 November 2022

Digital Stamp Nomor DS:0419-4047-1686-6320.

- Berdasarkan Nota Dinas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-PR.01.04-38 tanggal 15 Desember 2022 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2023, dilakukan blokir *Automatic Adjustment* atas saldo anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal sebesar Rp. 92.894.000,-

Jakarta, 2 JANUARI 2023

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal



Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Sekretaris Inspektorat Jenderal



Yayah Mariani
NIP 196403111994032007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yayah Mariani
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 JANUARI 2023

Sekretaris Inspektorat Jenderal

Yayah Mariani
NIP 196403111994032007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 INSPEKTUR WILAYAH I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Icon Siregar
Jabatan : Inspektur Wilayah I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Razilu
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 JANUARI 2023

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah I

Icon Siregar
NIP 196304171983031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR WILAYAH I DENGAN INSPEKTUR JENDERAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Maturitas SPIP	3 (terdefinisi)
		2. Opini Atas Laporan Keuangan	WTP
		3. Indeks Persepsi Integritas	80,2 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	1. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM	WTP
2.	Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	Level 3 - Terdefinisi
3.	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	3. Persentasi Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB"	94%
		4. Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 90	94%
		5. Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM	8 %
		6. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	80,2 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 (integrated)
		2. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	78 %
		3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	70 %
		4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	90 %
		5. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	85 %
		6. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	82 %
		7. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL I yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	8,0 %
		8. Level Maturitas SPIP Kemenkumham	4,439

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.429.775.000,-
1.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	Rp. 4.429.775.000,-

Sumber data : DIPA ITJEN Th.2023 Nomor DIPA-013.02-0/2023 Tanggal 30 November 2022

Digital Stamp Nomor DS:0419-4047-1686-6320.

- Berdasarkan Nota Dinas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-PR.01.04-38 tanggal 15 Desember 2022 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2023, dilakukan blokir *Automatic Adjustment* atas saldo anggaran Inspektorat Wilayah I sebesar Rp. 92.895.000,-

Jakarta, 2 JANUARI 2023

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal



Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah I



Icon Siregar
NIP 196304171983031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR WILAYAH I**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Icon Siregar
Jabatan : Inspektur Wilayah I

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 JANUARI 2023

Inspektur Wilayah I

Icon Siregar
NIP 196304171983031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 INSPEKTUR WILAYAH II

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lilik Sujandi
Jabatan : Inspektur Wilayah II

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Razilu
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 JANUARI 2023

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah II

Lilik Sujandi
NIP 197110171995031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR WILAYAH II DENGAN INSPEKTUR JENDERAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Maturitas SPIP	3 (terdefinisi)
		2. Opini Atas Laporan Keuangan	WTP
		3. Indeks Persepsi Integritas	80,2 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	1. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM	WTP
2.	Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	Level 3 - Terdefinisi
3.	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	3. Persentasi Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB"	94%
		4. Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 90	94%
		5. Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM	8%
		6. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	80,2 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 (integrated)
		2. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	60%
		3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	85%
		4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	87%
		5. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	72%
		6. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	77%
		7. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL II yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	5,0 %
		8. Level Maturitas SPIP Kemenkumham	4,439

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.429.775.000,-
1.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	Rp. 4.429.775.000,-

Sumber data : DIPA ITJEN Th.2023 Nomor DIPA-013.02-0/2023 Tanggal 30 November 2022

Digital Stamp Nomor DS:0419-4047-1686-6320

- Berdasarkan Nota Dinas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-PR.01.04-38 tanggal 15 Desember 2022 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2023, dilakukan blokir *Automatic Adjustment* atas saldo anggaran Inspektorat Wilayah II sebesar Rp. 92.895.000,-

Jakarta, 2 JANUARI 2023

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal



Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah II



Lilik Sujandi
NIP 197110171995031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR WILAYAH II**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lilik Sujandi
Jabatan : Inspektur Wilayah II

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 JANUARI 2023

Inspektur Wilayah II

Lilik Sujandi
NIP 197110171995031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 INSPEKTUR WILAYAH III

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iwan Santoso
Jabatan : Inspektur Wilayah III

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Razilu
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 JANUARI 2023

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

Razilu
NIP. 196511281991031002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah III

Iwan Santoso
NIP. 197004301991031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR WILAYAH III DENGAN INSPEKTUR JENDERAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Maturitas SPIP	3 (terdefinisi)
2. Opini Atas Laporan Keuangan		WTP	
3. Indeks Persepsi Integritas		80,2 (Indeks)	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	1. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM	WTP
2.	Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	Level 3 - Terdefinisi
3.	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	3. Persentasi Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB"	94%
		4. Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 90	94%
		5. Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM	8%
		6. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	80,2 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 (integrated)
		2. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	60%
		3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	75%
		4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	90%
		5. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	74%
		6. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	82%
		7. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL III yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	6,0 %
		8. Level Maturitas SPIP Kemenkumham	4,439

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.429.775.000,-
1.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	Rp. 4.429.775.000,-

Sumber data : DIPA ITJEN Th.2023 Nomor DIPA-013.02-0/2023 Tanggal 30 November 2022

Digital Stamp Nomor DS:0419-4047-1686-6320

- Berdasarkan Nota Dinas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-PR.01.04-38 tanggal 15 Desember 2022 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2023, dilakukan blokir *Automatic Adjustment* atas saldo anggaran Inspektorat Wilayah III sebesar Rp. 92.895.000,-

Jakarta, 2 JANUARI 2023

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal



Razilu
NIP. 196511281991031002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah III



Iwan Santoso
NIP. 197004301991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR WILAYAH III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iwan Santoso
Jabatan : Inspektur Wilayah III

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 JANUARI 2023

Inspektur Wilayah III

Iwan Santoso
NIP. 197004301991031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 INSPEKTUR WILAYAH IV

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Setyabudi
Jabatan : Inspektur Wilayah IV

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Razilu
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 JANUARI 2023

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah IV

Bambang Setyabudi
NIP 196911281997031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR WILAYAH IV DENGAN INSPEKTUR JENDERAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Maturitas SPIP	3 (terdefinisi)
		2. Opini Atas Laporan Keuangan	WTP
		3. Indeks Persepsi Integritas	80,2 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	1. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM	WTP
2.	Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	Level 3 - Terdefinisi
3.	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	1. Persentasi Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB"	94%
		2. Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 90	94%
		3. Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM	8%
		4. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	80,2 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 (integrated)
		2. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	58%
		3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	10%
		4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	90%
		5. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	77%
		6. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	82%
		7. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL IV yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	8%
		8. Level Maturitas SPIP Kemenkumham	4,439

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.429.775.000,-
1.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	Rp. 4.429.775.000,-

Sumber data : DIPA ITJEN Th.2023 Nomor DIPA-013.02-0/2023 Tanggal 30 November 2022

Digital Stamp Nomor DS:0419-4047-1686-6320

- Berdasarkan Nota Dinas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-PR.01.04-38 tanggal 15 Desember 2022 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2023, dilakukan blokir *Automatic Adjustment* atas saldo anggaran Inspektorat Wilayah IV sebesar Rp. 92.895.000,-

Jakarta, 2 JANUARI 2023

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal



Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah IV



Bambang Setyabudi
NIP 196911281997031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR WILAYAH IV**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Setyabudi
Jabatan : Inspektur Wilayah IV

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 JANUARI 2023

Inspektur Wilayah IV

Bambang Setyabudi
NIP 196911281997031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR WILAYAH V**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marasidin
Jabatan : Inspektur Wilayah V

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Razilu
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 JANUARI 2023

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

Razilu
NIP. 196511281991031002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah V

Marasidin
NIP. 196404251990011001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR WILAYAH V DENGAN INSPEKTUR JENDERAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Maturitas SPIP	3 (terdefinisi)
		2. Opini Atas Laporan Keuangan	WTP
		3. Indeks Persepsi Integritas	80,2 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	1. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM	WTP
2.	Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	Level 3 - Terdefinisi
3.	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	1. Persentasi Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB"	94%
		2. Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 90	94%
		3. Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM	8%
		4. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	80,2 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 (integrated)
		2. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	45%
		3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	33%
		4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	95%
		5. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	66%
		6. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	86%
		7. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL V yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	20%
		8. Level Maturitas SPIP Kemenkumham	4,439



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR WILAYAH V**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marasidin
Jabatan : Inspektur Wilayah V

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 JANUARI 2023

Inspektur Wilayah V

Marasidin
NIP. 196404251990011001

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.429.775.000,-
1.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	Rp. 4.429.775.000,-

Sumber data : DIPA ITJEN Th.2023 Nomor DIPA-013.02-0/2023 Tanggal 30 November 2022

Digital Stamp Nomor DS:0419-4047-1686-6320.

- Berdasarkan Nota Dinas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-PR.01.04-38 tanggal 15 Desember 2022 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2023, dilakukan blokir *Automatic Adjustment* atas saldo anggaran Inspektorat Wilayah V sebesar Rp. 92.895.000,-

Jakarta, 2 JANUARI 2023

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal



Razilu
NIP. 196511281991031002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah V



Marasidin
NIP. 196404251990011001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 INSPEKTUR WILAYAH VI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Luluk Ratnaningtyas
Jabatan : Inspektur Wilayah VI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Razilu
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 JANUARI 2023

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

Razilu
NIP. 196511281991031002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah VI

Luluk Ratnaningtyas
NIP. 196310011991032001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR WILAYAH VI DENGAN INSPEKTUR JENDERAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Maturitas SPIP	3 (terdefinisi)
		2. Opini Atas Laporan Keuangan	WTP
		3. Indeks Persepsi Integritas	80,2 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	1. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM	WTP
2.	Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	Level 3 - Terdefinisi
3.	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	1. Persentasi Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB"	94%
		2. Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 90	94%
		3. Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM	8%
		4. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	80,2 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	1. Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	3 (integrated)
		2. Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	27%
		3. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	84%
		4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	88%
		5. Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	94%
		6. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	82%
		7. Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL VI yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	8,0 %
		8. Level Maturitas SPIP Kemenkumham	4,439

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.100.526.000,-
1.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	Rp. 6.100.526.000,-

Sumber data : DIPA ITJEN Th.2023 Nomor DIPA-013.02-0/2023 Tanggal 30 November 2022

Digital Stamp Nomor DS:0419-4047-1686-6320.

- Berdasarkan Nota Dinas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-PR.01.04-38 tanggal 15 Desember 2022 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2023, dilakukan blokir *Automatic Adjustment* atas saldo anggaran Inspektorat Wilayah VI sebesar Rp. 92.895.000,-

Jakarta, 2 JANUARI 2023

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal



Razilu
NIP. 196511281991031002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah VI



Luluk Ratnaningtyas
NIP. 196310011991032001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR WILAYAH VI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Luluk Ratnaningtyas
Jabatan : Inspektur Wilayah VI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 JANUARI 2023

Inspektur Wilayah VI

Luluk Ratnaningtyas
NIP. 196310011991032001